

## Review

### Kolonisasi Kewargaan Digital

**WENDY H. WONG.** *We, the Data: Human Rights in the Digital Age.* Cambridge, MA: MIT Press, 2023. 352 pp. ISBN 9780262048576.

**Nuruddin Al Akbar**

Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro

Transformasi digital telah mengubah cara manusia bekerja, berkomunikasi, berbelanja, belajar, hingga berpartisipasi dalam kehidupan politik. Di balik kemudahan yang ditawarkan berbagai platform digital, terdapat proses yang semakin mengakar dalam kehidupan sehari-hari, yakni datafikasi (*datafication*): perubahan aktivitas manusia menjadi data yang dapat direkam, disimpan, dianalisis, dan dimanfaatkan untuk berbagai tujuan. Dalam dua dekade terakhir, perdebatan mengenai datafikasi umumnya berpusat pada persoalan privasi, keamanan siber, kecerdasan buatan, serta kekuasaan perusahaan teknologi global. Meskipun penting, fokus tersebut sering kali membuat manusia sebagai sumber data menghilang dari pusat pembahasan. Data diperlakukan sebagai komoditas ekonomi, sumber inovasi teknologi, atau instrumen pengelolaan sosial, sementara pertanyaan mengenai implikasinya terhadap martabat dan kebebasan manusia kerap berada di pinggir diskusi.

Dalam konteks inilah *We, the Data: Human Rights in the Digital Age* (2023) karya Wendy H. Wong hadir sebagai intervensi intelektual yang penting. Berangkat dari perspektif hak asasi manusia, Wong mengajak pembaca untuk melihat data bukan sebagai entitas teknis yang netral, melainkan sebagai sesuatu yang selalu melekat pada manusia yang menjadi sumbernya. Melalui konsep seperti *data stickiness* dan *data stakeholders*, ia menunjukkan bahwa data tidak pernah sepenuhnya terpisah dari pengalaman manusia serta memiliki konsekuensi nyata terhadap otonomi, martabat, kesetaraan, dan komunitas. Dengan demikian, datafikasi tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan teknologi, tetapi juga sebagai persoalan politik dan kemanusiaan.

Ulasan ini berargumen bahwa kontribusi Wong melampaui upayanya untuk menghubungkan data dengan hak asasi manusia. Dibaca dari perspektif kewargaan digital, buku ini sesungguhnya memperlihatkan gejala yang lebih mendasar, yakni kolonisasi kewargaan digital. Datafikasi tidak hanya mengancam privasi individu, tetapi

---

#### Korespondensi:

Department of Politics and Government, Universitas Diponegoro.

Gedung A Lt. 2 Fisip Undip, Jl. Prof. Soedarto, Tembalang, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50275

Email: nuruddin.alakbar@lecturer.undip.ac.id.

juga berpotensi mereduksi warga menjadi objek kalkulasi yang dapat diprediksi, diklasifikasikan, dan dikelola oleh negara maupun korporasi. Dalam arti tersebut, pertarungan utama era digital bukan hanya perlindungan data, melainkan juga keberlangsungan manusia sebagai subjek politik dalam kehidupan bersama.

Bagi Wong, persoalan utama era digital bukanlah sekadar semakin banyaknya data yang dihasilkan manusia, melainkan perubahan cara manusia dipahami melalui data. Buku ini dibuka dengan contoh-contoh yang tampak biasa dalam kehidupan sehari-hari, seperti penggunaan Ring Doorbell, telepon pintar, perangkat rumah tangga pintar, dan berbagai teknologi yang terhubung dengan internet. Teknologi-teknologi tersebut menjanjikan kenyamanan, keamanan, dan efisiensi, tetapi pada saat yang sama bekerja sebagai mesin pengumpul data yang terus merekam aktivitas manusia. Dalam pandangan Wong, kecerdasan perangkat-perangkat tersebut sebenarnya tidak terletak pada kemampuannya membantu manusia, melainkan pada kemampuannya mengumpulkan, menghubungkan, dan mengolah data tentang manusia. Aktivitas yang sebelumnya bersifat personal dan sementara kini diubah menjadi jejak digital yang dapat disimpan dan dianalisis dalam jangka waktu yang sangat panjang.

Karena itu, Wong mengkritik kecenderungan untuk memahami data sebagai sesuatu yang berdiri sendiri dan terpisah dari manusia. Menurutnya, berbagai perdebatan mengenai kecerdasan buatan, Big Data, maupun ekonomi digital sering kali berpusat pada kepentingan para pengumpul data (*data collectors*), sementara suara manusia sebagai sumber data cenderung tidak terdengar. Ia bahkan mengkritik penggunaan istilah *data subject* yang umum digunakan dalam berbagai regulasi dan diskusi kebijakan. Istilah tersebut, menurut Wong, secara tidak sadar menempatkan manusia dalam posisi pasif sebagai objek pengumpulan data. Sebagai alternatif, ia mengusulkan konsep *data stakeholders*, yaitu gagasan bahwa setiap individu memiliki kepentingan dan hak untuk ikut menentukan bagaimana data tentang dirinya dikumpulkan, digunakan, dan diatur. Dengan kata lain, manusia tidak boleh dipandang hanya sebagai sumber bahan baku bagi ekonomi data, melainkan sebagai pihak yang memiliki klaim normatif terhadap proses datafikasi itu sendiri.

Untuk memperkuat argumen tersebut, Wong membangun seluruh analisisnya di atas empat nilai dasar hak asasi manusia yang menurutnya menjadi fondasi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yaitu otonomi (*autonomy*), martabat (*dignity*), kesetaraan (*equality*), dan komunitas (*community*). Keempat nilai ini menjadi alat analisis yang digunakan untuk menilai dampak datafikasi terhadap kehidupan manusia. Bagi Wong, persoalan utama datafikasi bukanlah bahwa teknologi digital menghasilkan lebih banyak informasi, melainkan bahwa teknologi tersebut secara perlahan mengubah kondisi yang memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang bermartabat, bebas, setara, dan terhubung dengan komunitasnya. Dalam kerangka ini, data bukan sekadar isu privasi atau kepemilikan informasi, tetapi persoalan yang menyentuh inti pengalaman manusia sebagai makhluk sosial dan politik.

Konsep paling penting yang dikembangkan Wong untuk menjelaskan fenomena tersebut adalah *data stickiness*. Ia berargumen bahwa data memiliki sifat "lengket" karena tidak mudah dipisahkan dari manusia yang menjadi sumbernya. Kelengketan ini muncul setidaknya karena empat karakteristik. Pertama, data bersifat *co-created*, yakni selalu lahir dari interaksi antara sumber data dan pengumpul data. Kedua, data berasal

dari aktivitas sehari-hari yang sering kali tampak sepele dan tidak penting. Ketiga, data selalu terhubung dengan data lain sehingga membentuk jaringan informasi yang semakin luas. Keempat, data memiliki kecenderungan untuk bertahan lama, bahkan ketika manusia yang menjadi sumbernya telah berubah atau tidak lagi hidup. Karena karakteristik inilah data terus memengaruhi kehidupan seseorang jauh melampaui momen ketika data tersebut pertama kali dihasilkan.

Sifat lengket data (*data stickiness*) tersebut menjadi fondasi bagi pembahasan Wong mengenai berbagai persoalan yang muncul dalam masyarakat digital. Salah satu yang paling menarik adalah pembahasannya mengenai hak atas data (*data rights*). Wong menunjukkan bahwa berbagai upaya untuk melindungi manusia dari dampak negatif datafikasi sering kali terjebak pada bahasa kepemilikan. Data dipahami sebagai sesuatu yang dapat dimiliki sebagaimana benda atau properti. Akibatnya, solusi yang diajukan umumnya berkisar pada penguatan hak milik atas data atau hak untuk menghapus data tertentu dari ruang digital. Namun Wong mempersoalkan asumsi tersebut. Karena data selalu lahir melalui hubungan antara sumber data dan pengumpul data, maka tidak ada pihak yang dapat mengklaim kepemilikan penuh atas data tersebut. Data tentang seseorang tidak pernah sepenuhnya milik individu yang bersangkutan, tetapi juga tidak sepenuhnya milik perusahaan atau institusi yang mengumpulkannya. Di sinilah Wong melihat keterbatasan pendekatan yang hanya berfokus pada privasi, kepemilikan, atau bahkan *right to be forgotten*. Ketiga pendekatan tersebut gagal menangkap sifat relasional dan kolektif dari data.

Argumen serupa muncul dalam pembahasannya mengenai teknologi pengenalan wajah (*facial recognition technology*). Bagi Wong, wajah merupakan salah satu unsur paling mendasar dalam identitas manusia. Wajah memungkinkan manusia mengenali satu sama lain, membangun hubungan sosial, dan hadir dalam ruang publik sebagai pribadi yang unik. Akan tetapi, teknologi pengenalan wajah mengubah wajah menjadi serangkaian titik data yang dapat disimpan, dibandingkan, dan dihubungkan dengan basis data lain untuk menghasilkan berbagai inferensi mengenai seseorang. Transformasi wajah menjadi data ini tidak hanya menimbulkan persoalan privasi, tetapi juga menyentuh persoalan martabat manusia. Lebih jauh lagi, Wong menunjukkan bahwa berbagai penelitian telah menemukan bias rasial dan gender dalam teknologi pengenalan wajah. Akibatnya, kelompok tertentu lebih rentan mengalami salah identifikasi, pengawasan berlebihan, atau diskriminasi dibanding kelompok lainnya. Dalam konteks ini, datafikasi bukan sekadar persoalan teknis mengenai akurasi algoritma, melainkan persoalan politik yang berkaitan dengan distribusi risiko dan ketidaksetaraan dalam masyarakat.

Persoalan yang tidak kalah menarik muncul ketika Wong membahas apa yang terjadi terhadap data setelah seseorang meninggal dunia. Di tengah berkembangnya teknologi kecerdasan buatan, berbagai perusahaan mulai mengembangkan sistem yang memungkinkan data seseorang digunakan untuk membangun avatar digital, chatbot, atau bentuk-bentuk lain dari apa yang sering disebut sebagai *digital immortality*. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar yang jarang dibahas dalam tradisi hak asasi manusia klasik: apakah hak seseorang berakhir ketika ia meninggal? Wong menunjukkan bahwa datafikasi membuat batas antara hidup dan mati menjadi semakin kabur. Seseorang dapat meninggal secara biologis, tetapi berbagai representasi

digitalnya tetap aktif dan bahkan berinteraksi dengan orang lain. Dalam situasi semacam ini, persoalan martabat dan otonomi memperoleh dimensi baru yang tidak pernah dibayangkan oleh para perancang kerangka hak asasi manusia pasca-Perang Dunia II.

Meskipun demikian, inti kritik Wong sesungguhnya diarahkan pada struktur kekuasaan yang menopang seluruh proses datafikasi tersebut. Dalam bab mengenai Big Tech, ia menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan teknologi tidak lagi sekadar berperan sebagai pelaku ekonomi. Platform-platform digital kini menjalankan fungsi yang secara tradisional diasosiasikan dengan negara, seperti mengatur informasi, menentukan batas kebebasan berekspresi, dan mengelola ruang publik digital. Kehadiran Meta Oversight Board menjadi contoh penting dalam argumen ini. Dewan tersebut pada dasarnya berfungsi sebagai mekanisme adjudikasi untuk memutuskan konten apa yang boleh dan tidak boleh beredar di platform Meta. Bagi Wong, fenomena ini menunjukkan bahwa tata kelola digital semakin bergeser dari institusi publik menuju aktor-aktor privat yang memiliki kekuasaan luar biasa besar terhadap kehidupan sosial dan politik masyarakat. Dengan demikian, perdebatan mengenai data tidak lagi dapat dibatasi pada hubungan antara individu dan teknologi, tetapi harus mencakup relasi kekuasaan yang lebih luas antara warga, negara, dan korporasi global.

Kesadaran akan relasi kekuasaan inilah yang kemudian mendorong Wong mengajukan salah satu proposal normatif terpenting dalam bukunya, yakni menjadikan literasi data sebagai hak asasi manusia. Menurutnya, warga tidak mungkin berpartisipasi secara bermakna dalam tata kelola data apabila mereka tidak memahami bagaimana data dikumpulkan, diproses, dan digunakan. Literasi data tidak sekadar berarti kemampuan teknis menggunakan perangkat digital, tetapi juga kemampuan memahami implikasi sosial dan politik dari datafikasi. Wong bahkan menempatkan organisasi masyarakat sipil dan perpustakaan sebagai institusi penting dalam membangun kapasitas tersebut. Dengan cara ini, warga diharapkan tidak lagi menjadi objek pasif dalam ekonomi data, melainkan mampu bertindak sebagai *stakeholders* yang secara aktif membentuk masa depan digital mereka sendiri.

Meskipun menawarkan kontribusi penting, Wong cenderung mengasumsikan bahwa bahasa hak asasi manusia merupakan kerangka normatif yang memadai untuk menghadapi tantangan datafikasi. Asumsi ini dapat dipersoalkan. Berbagai kritik terhadap liberalisme menunjukkan bahwa hak individu sering kali tidak cukup untuk menjelaskan dimensi kolektif dan struktural dari kekuasaan digital. Dalam konteks ini, persoalan data tidak hanya berkaitan dengan perlindungan individu, tetapi juga dengan transformasi relasi sosial dan politik yang membentuk kehidupan bersama. Dengan demikian, pertanyaan yang muncul bukan hanya bagaimana melindungi hak individu atas data, tetapi juga bagaimana mempertahankan ruang publik dan kapasitas warga untuk berpartisipasi dalam kehidupan demokratis di tengah dominasi platform digital.

Kontribusi terbesar Wong terletak pada keberhasilannya mengembalikan manusia ke pusat perdebatan mengenai data. Di tengah dominasi diskursus yang berfokus pada algoritma, kecerdasan buatan, dan inovasi teknologi, ia mengingatkan bahwa data selalu berasal dari manusia dan karena itu harus dipahami dalam kerangka nilai-nilai yang melindungi kehidupan manusia. Namun demikian, kekuatan argumen tersebut sekaligus membuka ruang bagi pengembangan teoritis lebih lanjut. Wong

berhasil menunjukkan bahwa data tidak pernah sepenuhnya terpisah dari manusia yang menjadi sumbernya. Akan tetapi, buku ini belum sepenuhnya menjelaskan mengapa keterikatan tersebut memiliki konsekuensi moral dan politik yang demikian besar. Pada titik inilah argumen Wong dapat diperluas melalui perspektif fenomenologi dan teori kritis untuk memahami bukan hanya hubungan antara manusia dan data, tetapi juga implikasinya terhadap kewargaan dalam masyarakat digital.

Wong menjawab pertanyaan tersebut melalui konsep *data stickiness*. Data disebut lengket karena sulit dipisahkan dari manusia yang menjadi sumbernya. Akan tetapi, penjelasan ini masih bersifat deskriptif. Buku ini menjelaskan bagaimana data melekat pada manusia, tetapi tidak sepenuhnya menjelaskan mengapa hubungan tersebut begitu kuat. Pada titik inilah pendekatan fenomenologis dapat membantu memperluas implikasi argumen Wong. Dalam tradisi fenomenologi, khususnya pada pemikiran Maurice Merleau-Ponty (2012), manusia tidak dipahami sebagai kesadaran murni yang terpisah dari tubuhnya. Manusia mengalami dunia melalui tubuh, sehingga pengalaman, tindakan, dan identitas selalu bersifat kebertubuhan (*embodied*). Dari perspektif ini, data tidak dapat dipahami semata-mata sebagai informasi tentang manusia. Data merupakan jejak dari pengalaman manusia yang hidup dalam dunia.

Pembacaan semacam ini memungkinkan kita melihat bahwa data bukan sekadar representasi eksternal mengenai seseorang. Riwayat lokasi yang terekam melalui GPS, pola tidur yang direkam oleh perangkat kesehatan digital, wajah yang dipetakan melalui teknologi pengenalan wajah, maupun kebiasaan membaca yang dilacak oleh platform digital merupakan bagian dari pengalaman hidup yang dijalani manusia melalui tubuhnya. Dengan demikian, ketika data diperlakukan sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan, dianalisis, dan dimonetisasi secara bebas, yang dipertaruhkan sesungguhnya bukan hanya informasi, melainkan juga aspek-aspek dari pengalaman manusia itu sendiri. Dalam pengertian ini, argumen Wong mengenai keterikatan antara manusia dan data memperoleh dasar yang lebih kuat. Data layak memperoleh perhatian dalam kerangka hak asasi manusia bukan hanya karena data dapat digunakan untuk merugikan individu, melainkan karena data merupakan perpanjangan dari keberadaan manusia yang hidup.

Pembacaan fenomenologis tersebut sekaligus membantu menjelaskan mengapa persoalan data tidak dapat direduksi menjadi isu privasi semata. Sebagian besar perdebatan publik mengenai tata kelola data berangkat dari asumsi bahwa individu adalah pemilik informasi yang berkaitan dengan dirinya. Jika demikian, maka persoalannya menjadi soal siapa yang boleh mengakses informasi tersebut. Akan tetapi, apabila data dipahami sebagai bagian dari pengalaman manusia yang hidup, maka persoalannya menjadi jauh lebih luas. Pertanyaan yang muncul bukan hanya siapa yang memiliki data, tetapi juga bagaimana data digunakan untuk membentuk cara manusia memahami dirinya sendiri, berinteraksi dengan orang lain, dan berpartisipasi dalam kehidupan bersama.

Pada titik inilah argumen Wong dapat dibaca sebagai kritik terhadap kecenderungan yang lebih mendasar dalam masyarakat digital kontemporer. Meskipun ia tidak menggunakan istilah tersebut, berbagai contoh yang diuraikan dalam buku ini menunjukkan bagaimana datafikasi memperluas logika yang mengubah manusia menjadi objek pengelolaan. Wajah menjadi data biometrik. Preferensi menjadi profil

perilaku. Interaksi sosial menjadi jaringan yang dapat dipetakan. Aktivitas sehari-hari menjadi sumber prediksi mengenai tindakan di masa depan. Semakin banyak aspek kehidupan diterjemahkan ke dalam bentuk data, semakin besar pula kecenderungan untuk memahami manusia melalui kategori-kategori yang dapat dihitung, diprediksi, dan diintervensi. Dalam situasi seperti ini, persoalan utama bukan lagi sekadar pengumpulan data, melainkan perubahan cara masyarakat memahami manusia dan kewargaan itu sendiri.

Untuk memahami implikasi politik dari proses tersebut, pemikiran Jürgen Habermas menawarkan kerangka yang menarik. Dalam *The Theory of Communicative Action*, Habermas membedakan antara sistem (*system*) dan dunia kehidupan (*lifeworld*). Sistem merujuk pada ranah yang diorganisasikan melalui logika administratif, birokratis, dan ekonomi. Sebaliknya, dunia kehidupan merupakan ruang tempat identitas, makna, solidaritas, dan komunikasi antarmanusia dibentuk dan dipelihara. Menurut Habermas, salah satu patologi utama modernitas adalah kolonisasi dunia kehidupan oleh sistem, yakni ketika logika instrumental yang semula terbatas pada administrasi dan ekonomi mulai menguasai wilayah-wilayah kehidupan yang sebelumnya dibangun melalui komunikasi dan relasi sosial.

Meskipun tidak menggunakan kerangka Habermasian, banyak contoh yang dikemukakan Wong menunjukkan kecenderungan serupa dalam masyarakat digital. Datafikasi memungkinkan berbagai aspek kehidupan manusia diterjemahkan ke dalam bahasa yang dapat diproses oleh sistem. Hubungan sosial menjadi jaringan data. Preferensi pribadi menjadi profil perilaku. Mobilitas warga menjadi pola pergerakan yang dapat diprediksi. Bahkan wajah manusia direduksi menjadi serangkaian titik biometrik yang dapat dicocokkan dengan basis data lain. Dalam setiap kasus tersebut, pengalaman manusia diterjemahkan ke dalam format yang memungkinkan pengukuran, klasifikasi, prediksi, dan intervensi. Dengan kata lain, dunia kehidupan semakin dibaca melalui logika sistem.

Di sinilah konsep kolonisasi kewargaan digital menjadi relevan. Selama ini, perdebatan mengenai data umumnya dipahami sebagai persoalan hubungan antara individu dan teknologi. Wong sendiri berupaya melampaui batasan tersebut dengan menekankan dimensi komunitas dan tata kelola data. Akan tetapi, konsekuensi politik yang lebih luas dari argumennya adalah bahwa yang sedang mengalami transformasi bukan hanya individu, melainkan juga warga negara. Dalam masyarakat demokratis, warga idealnya hadir sebagai subjek politik yang mampu berpartisipasi dalam pembentukan keputusan kolektif. Kewargaan tidak hanya berkaitan dengan kepemilikan hak, tetapi juga dengan kemampuan untuk berbicara, berargumentasi, berasosiasi, dan membentuk dunia bersama dengan warga lainnya. Namun dalam rezim datafikasi, warga semakin sering hadir bukan sebagai subjek komunikasi, melainkan sebagai objek informasi.

Perubahan ini tampak jelas dalam berbagai praktik tata kelola digital kontemporer. Negara menggunakan data untuk memetakan risiko keamanan, mengelola populasi, dan mengawasi perilaku warga. Korporasi menggunakan data untuk memprediksi preferensi konsumen, mengarahkan iklan, dan memengaruhi pilihan individu. Platform digital menggunakan data untuk menentukan informasi apa yang layak dilihat dan interaksi apa yang perlu diperkuat atau dibatasi. Dalam seluruh

proses tersebut, warga tampil terutama sebagai sumber data yang dapat diolah demi tujuan administratif, ekonomi, maupun politik. Semakin besar kapasitas institusi untuk mengumpulkan dan menganalisis data, semakin kuat pula kecenderungan untuk memahami manusia melalui logika kalkulasi. Warga perlahan berubah menjadi profil, skor, kategori, dan prediksi.

Dari perspektif ini, kontribusi Wong menjadi lebih penting sekaligus lebih radikal daripada yang tampak pada pandangan pertama. Ketika ia menolak melihat manusia sekadar sebagai *data subjects* dan mengusulkan konsep *data stakeholders*, ia sebenarnya sedang mempertahankan kemungkinan bagi manusia untuk tetap hadir sebagai subjek dalam dunia digital. Akan tetapi, bahasa hak asasi manusia yang digunakan Wong belum sepenuhnya menangkap dimensi kewargaan dari persoalan tersebut. Yang dipertaruhkan bukan hanya otonomi individu atau perlindungan privasi, melainkan kemampuan warga untuk tetap menjadi pelaku politik dalam ruang publik yang semakin dimediasi oleh data. Oleh karena itu, ancaman terbesar dari datafikasi mungkin bukan hilangnya privasi, melainkan erosi kondisi-kondisi yang memungkinkan kewargaan demokratis itu sendiri.

Dengan demikian, *We, the Data* dapat dibaca sebagai sebuah peringatan mengenai bentuk baru kolonisasi dalam masyarakat digital. Jika kolonialisme klasik berupaya menguasai wilayah dan sumber daya, maka kolonisasi digital bekerja melalui penguasaan data yang dihasilkan oleh kehidupan sehari-hari manusia. Yang diekstraksi bukan lagi tanah atau tenaga kerja semata, melainkan pengalaman, relasi sosial, perhatian, dan perilaku manusia. Dalam konteks ini, perjuangan untuk melindungi hak asasi manusia di era digital tidak cukup dilakukan melalui penguatan privasi atau regulasi data. Ia juga memerlukan upaya untuk mempertahankan ruang di mana manusia dapat hadir sebagai warga yang berkomunikasi, berpartisipasi, dan membentuk kehidupan bersama tanpa direduksi menjadi sekumpulan data yang dapat diprediksi dan dikelola.

Sebagai karya yang berada di persimpangan antara studi hak asasi manusia, teknologi digital, dan tata kelola global, *We, the Data* merupakan kontribusi yang penting dan tepat waktu. Keunggulan utama buku ini terletak pada kemampuannya menggeser fokus perdebatan dari teknologi menuju manusia. Di tengah antusiasme terhadap kecerdasan buatan, Big Data, dan transformasi digital, Wong mengingatkan bahwa data tidak pernah berdiri sendiri. Data selalu berhubungan dengan manusia yang menjadi sumbernya dan karena itu harus dinilai berdasarkan dampaknya terhadap otonomi, martabat, kesetaraan, dan komunitas. Melalui konsep *data stickiness* dan *data stakeholders*, Wong berhasil menunjukkan bahwa persoalan data jauh melampaui isu teknis mengenai keamanan informasi atau kepemilikan data. Ia merupakan persoalan politik dan moral yang menyentuh inti kehidupan manusia.

Meskipun demikian, buku ini juga meninggalkan sejumlah pertanyaan yang menarik untuk dikembangkan lebih lanjut. Salah satunya adalah bagaimana memahami hubungan antara manusia dan data secara lebih mendasar, serta bagaimana menjelaskan implikasi politik dari datafikasi terhadap kehidupan demokratis. Di sinilah pembacaan melalui perspektif kebertubuhan dan dunia kehidupan menawarkan perluasan atas argumen Wong. Jika data dipahami sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pengalaman manusia, dan jika datafikasi memungkinkan logika

administratif maupun komersial menjangkau semakin banyak aspek kehidupan sehari-hari, maka persoalan yang muncul bukan hanya ancaman terhadap privasi, tetapi juga kolonisasi kewargaan digital. Warga secara perlahan direduksi menjadi objek informasi yang dapat diprediksi, diklasifikasikan, dan dikelola oleh berbagai sistem digital.

Karena itu, buku ini layak dibaca tidak hanya oleh peneliti hak asasi manusia atau studi media digital, tetapi juga oleh ilmuwan politik, pengkaji demokrasi, dan para pembuat kebijakan. Kekuatan terbesar *We, the Data* terletak pada kemampuannya membuka ruang refleksi mengenai apa yang sesungguhnya dipertaruhkan dalam masyarakat digital. Pada akhirnya, pertanyaan paling penting yang diajukan Wong bukanlah siapa yang memiliki data, melainkan bagaimana manusia dapat tetap mempertahankan martabat dan agensinya ketika semakin banyak aspek kehidupannya diterjemahkan ke dalam bentuk data. Pertanyaan tersebut menjadikan buku ini sebagai bacaan penting bagi siapa pun yang ingin memahami masa depan kewargaan di era digital.

### Referensi

- Habermas, J. (1987). *The theory of communicative action: Vol. 2. Lifeworld and system: A critique of functionalist reason*. Beacon Press.
- Merleau-Ponty, M. (2012). *Phenomenology of perception* (D. A. Landes, Trans.). Routledge. (Original work published 1945).

### Tentang Penulis

**Nuruddin Al Akbar** adalah dosen Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro. Penulis memiliki area riset seputar teori politik, demokrasi, dan media.